

ISLAM DAN NEGARA
(NEGARA PANCASILA MENURUT PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat islam
dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh :

Dedy Faisal
00510079

JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSIATAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2007

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Dedy Faisal
NIM : 00510079
Jurusan : Aqidah Filsafat
Fakultas : Ushuluddin

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “Islam Dan Negara (Negara Pancasila Menurut Pemikiran Munawir Sjadzali)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah menjadi rujukan dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya skripsi ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, semoga dapat dimaklumi dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Oktober 2007

Yang menyatakan,

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown with a signature over it. The stamp features the number '6000' and the text 'METAL TEMPEL'.

Dedy Faisal
NIM. 00510079

Drs. Sudin, M. Hum
Fahrudin Faiz, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Dedy Faisal
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kpd Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan-perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing skripsi dari saudara :

Nama : Dedy Faisal
NIM : 00510079
Jurusan : Aqidah Filsafat
Judul Skripsi : **ISLAM DAN NEGARA (NEGARA PANCASILA
MENURUT PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI)**

Dengan ini kami menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan ke siding Munaqasyah skripsi pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

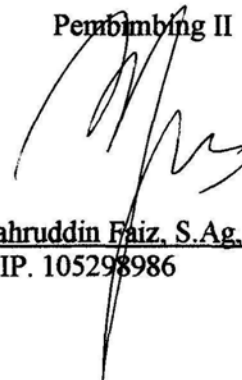
Yogayakarta, Oktober 2007
Hormat kami,

Pembimbing I



Drs. Sudin, M. Hum
NIP. 105239744

Pembimbing II



Fahrudin Faiz, S.Ag, M.Ag
NIP. 105298986



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telpon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/1601A/2007

Skripsi dengan judul : *Islam dan Negara (Negara Pancasila Menurut Pemikiran Munawir Sjadzali)*

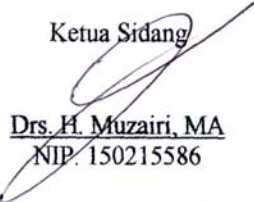
Diajukan oleh :

1. Nama : Dedy Faisal
2. NIM : 00510079
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : AF


Telah dimunaqosyahkan pada hari : Selasa, tanggal : 13 Nopember 2007 dengan nilai: 75 (B) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :


Ketua Sidang


Drs. H. Muzairi, MA
NIP. 150215586


Sekretaris Sidang


Drs. Sudin, M.Hum
NIP. 150239744

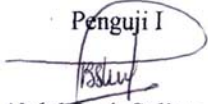
Pembimbing/merangkan Penguji


Drs. Sudin, M.Hum
NIP. 150239744


Pembantu Pembimbing


Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150298986


Penguji I


Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag.
NIP. 150235497

Penguji II


Drs. Sudin, M.Hum
NIP. 150239744

Yogyakarta, 13 Nopember 2007
DEKAN


Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A.
NIP. 150236146



MOTTO



*“CIPTAKAN SISI KEGEMBIRAAN DI ANTARA PERIH
KEHIDUPAN”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- ❖ *Sang pengobar jiwa Bapakku yang tercinta*
- ❖ *Sang bidadari surga ibuku yang tersayang*
- ❖ *Sang penyejuk jiwa saudara-saudaraku yang terkasih*
- ❖ *Ra2 yang selalu memberi motivasi dan inspirasi*
- ❖ *Sahabat-sahabatku yang terindah*
- ❖ *Almamaterku UIN Sunan Kalijaga yang penuh dengan makna*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada yang Maha Pemurah, Allah SWT atas segala kemurahan-Nya penulis diberi daya dan ketekunan dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Filasafat islam pada Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, tetapi penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ushuluddin Drs. Moh. Fahmi M.Hum, ketua jurusan Aqidah dan Filasafat serta staf-staf birokrasi fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Sudin M.Hum selaku pembimbing I dan Fahrudin Faiz S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II, yang telah mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Abdul Basir Solissa M.Ag sebagai pembimbing akademik.
4. Semua sahabat dan handai taulan yang telah membantu kami dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, harapan yang selalu menyertai penulis, semoga atas segala keterlibatan dan bantuannya, Allah SWT berkenan memberikan kekuatan dan kedamaian kepada kita semua. Amien. Karena hanya Allah-lah yang mampu memberikan yang terbaik atas kekuatan dan kedamaian itu. Terima kasih.

Jogyakarta, Oktober 2007

Penulis

ABSTRAK

Negara Pancasila pengertian ini bisa ditelusuri dari sejarah bangsa yang penuh perdebatan dalam sejarahnya menentukan Pancasila sebagai dasar Negara, hal tersebut tidak terlepas pada sejarah pemikiran politik, tidak terkecuali pemikiran politik Islam. Sementara itu, hubungan antara politik Islam dan Negara Indonesia sendiri terjadi ketidakharmonisan terutama disebabkan dalam menentukan konstruk kenegaraan.

Salah satu tokoh yang banyak berbicara tentang Islam dan Negara adalah Munawir Sjadzali. Kemudian pemikirannya tidak terlepas dari jiwa keislamannya, karena pada masa kecilnya, ia telah ditempa oleh orang tuanya dengan nilai-nilai ajaran Islam dan ditambah latar belakang ayah kandungnya sebagai seorang Kyai.

Pemikiran Munawir mengenai negara agama atau negara teokrasi, sebuah negara akan dikatakan negara agama atau teokarasi, apabila terdapat unsur-unsur tertentu, maka negara tersebut dapat dikatakan negara agama, atau negara teokrasi.

Pancasila sebagai ideologi negara Menurut Munawir dikarnakan negara Indonesia tidak terdapat dari unsur negara agama atau negara teokarasi. Pancasila sebagai ideologi negara menurut Munawir merupakan untuk kepentingan umat islam dan masyarakat secara umum, baik itu dari aspek politik maupun sosial-ekonomi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II. RIWAYAT HIDUP DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI	
A. Latar Belakang Biografis.....	14
B. Perjuangan dan Karir Munawir Sjadzali.....	17
C. Pemikiran Keislaman Munawir Sjadzali.....	20

	D. Pemikiran Munawir Sjadzali Terhadap Bangsa Indonesia.....	23
BAB III.	PEMIKIRAN NEGARA DALAM ISLAM	
	A. Sejarah dan Pemerintahan Umat Islam.....	27
	B. Berbagai Pemikiran Bernegara Dalam Islam.....	32
BAB IV.	PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI TENTANG NEGARA: AGAMA (ISLAM) DAN PANCASILA	
	A. Negara Agama (Islam).....	41
	B. Negara Pancasila.....	49
BAB V.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran-saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak perbincangan mengenai “negara” salah satu isu sentral merupakan pencarian konsep tentang negara, pencarian konsep tentang negara selalu berhubungan pada sejarah pemikiran politik, tidak terkecuali pemikiran politik Islam. Pemikiran politik Islam sesungguhnya merefleksikan upaya pencarian landasan intelektual bagi fungsi dalam peranan pemerintah atau negara sebagai faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan baik lahir maupun batin.¹

Salah satu yang dihadapi oleh negara-negara mayoritas masyarakatnya Islam pada masa pembentukannya adalah bagaimana mendudukan agama dalam kehidupan bernegara. Menurut Deliar Noer, Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarakat atau politik.² Akan tetapi mengartikulasikan dua aspek pokok tersebut dalam kehidupan nyata menjadi problem sendiri.

Umat Islam pada umumnya mempercayai watak holistik Islam. Dalam persepsi mereka, Islam sebagai intrumen ilahiyah untuk memahami dunia, sering kali dipandang sebagai lebih dari sekedar agama. Beberapa kalangan

¹ Din Syamsudin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam”, dalam *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia*, Abu Zahra (ed.), cet. 1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 43.

² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. Kedelapan, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 1.

malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai agama dan negara.³

Sementara itu, hubungan politik antara Islam dan negara Indonesia sendiri pada sebagian babakan sejarahnya merupakan cerita antagonis dalam kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang tidak harmonis ini terutama disebabkan oleh perbedaan pandangan pendiri republik ini –yang sebagian besar muslim- mengenai Indonesia merdeka yang dicita-citakan. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan adalah apakah negara bercorak Islami atau nasionalis.⁴ Konstruksi kenegaraan pertama mengharuskan agar Islam diakui dan diterima sebagai ideologi negara. Sementara konstruksi kenegaraan kedua menghendaki agar Indonesia didasarkan atas Pancasila sebagai ideologi.

Sejarah perkembangan masyarakat Indonesia sebagai negara dalam proses perumusan konsep dasar tata-hubungan masyarakat memberi petunjuk yang sangat jelas tentang perbedaan antara pemerintah dan umat Islam. Adapun perbedaan tersebut menyangkut tentang ideologi sosial sebagai sumber pola hubungan sosial. Bagi umat Islam ideologi merupakan terjemahan langsung dari aqidah Islam, sementara meletakkan akar sejarah budaya.⁵

Sebagaimana diketahui Islam masuk ke Indonesia melalui pendekatan kultural dan intelektual, nilai-nilai Islam yang ditawarkan pada masyarakat

³ Ahamad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Pencatutan Konstituante*. (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 15.

⁴ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pramadina, 1998), hlm. 60.

⁵ Abdul Munir Mul Khan, *Perubahan Prilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987 dalam Perspektif Sosiologis*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm 3.

nusantara dikemas menjadi sebuah sistem budaya yang kemudian dicerna dan berartikulasi dengan budaya nusantara.⁶

Sesuai pengalaman masyarakat Indonesia dalam berbangsa, akar budaya tersebut diartikulasikan dalam rumusan filosofis Pancasila. Berdasarkan konsep ideologi sosial Indonesia adalah Pancasila, strukturisasi konsep ideologi tersebut disusun dengan rumusan secara agak berbeda umat Islam⁷. Dari perbedaan tersebut sehingga munculah ketegangan antara keduanya.

Perbedaan pandangan tentang hubungan agama (Islam) dan Negara,⁸ khususnya setelah kemerdekaan ketika masa-masa pembentukan konstitusi negara Indonesia, secara lebih nyata ini dapat dilihat ketika terjadi suatu polemik-polemik pada awal 1940-an, polemik itu telah menyentuh masalah yang lebih penting, yakni hubungan politik antara agama dan negara. Dalam periode ini, tidak berlebihan jika dikatakan tokoh yang sering terlibat adalah Soekarno dan Natsir.

Soekarno pada dasarnya mendukung pemisahan antara agama (Islam) dan negara. Akan tetapi ia tidak menyatakan dengan tegas bahwa sama sekali tidak boleh ada hubungan apapun antara keduanya. Dia memang dengan tegas menentang pandangan mengenai formal-legal antara Islam dan Negara, dan Oleh M. Natsir ide tersebut ditolakny, kemudian Natsir mempertegas

⁶ Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pularalisme dan Budaya Politik*, cet. 1, (Yogyakarta: SIpess, 1994), hlm, 173.

⁷ Ummat Islam menempatkan Pancasila dalam perspektif agamanya yaitu Islam, sementara pemerintah meletakkan konsep social Islam dalam perspektif Pancasila, Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan...*, hlm. 4.

⁸ Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, cet.1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 144.

kembali pendiriannya tersebut didepan Majelis Konstituante pada tahun 1957 tentang hubungannya antara Islam dengan negara Indonesia. Dengan pidatonya yang berjudul “Islam sebagai Dasar Negara” Natsir berdalil bahwa untuk dasar negara, Indonesia mempunyai dua pilihan, yaitu sekularisme (*lā-diniyyah*) atau paham agama.

Untuk itulah dalam sejarah pertumbuhan setelah kemerdekaan, ketegangan konflik antara pemerintah dan umat Islam secara terbuka tentang dasar negara tersebut berlangsung hampir sepanjang periode, hingga untuk waktu yang agak lama sejarah Islam Indonesia ditandai kemandegan politik dan sikap saling curiga antara Islam politik dengan negara. Kekalahan-kekalahan yang dialami bukan saja pada bidang politik melainkan berimplikasi pada kerentanan umat dalam kehidupan sosial ekonomi.⁹ Barulah kemudian pada masa Orde Baru konflik tersebut nampaknya dapat ditekan sampai titik paling lemah, setidaknya pada konflik secara terbuka.¹⁰

Berkembangnya sikap saling curiga dan permusuhan politik inilah yang direduksi oleh tokoh intelektual generasi baru tahun 70-an dan 80-an, dengan salah satu tujuan mengembangkan format baru politik Islam yang dianggap sesuai dengan konstruk ideologis negara kebangsaan Indonesia. Kemudian Munawir Sjadzali muncul tahun 80-an dengan mengembangkan pikiran-

⁹ *Ibid*, halm.12.

¹⁰ Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan....*. hlm. 6.

pikirannya tentang keagamaan juga bagaimana pikiran-pikiran itu membentuk gagasan politik.¹¹

Hal itu dapat terlihat dari pandangannya yang mengatakan mengenai “Negara Pancasila bukan Negara Agama”, yang juga menjadi tafsiran baru pemerintahan Orde Baru.¹² Menurut Munawir, sebuah negara dapat dikatakan negara agama, apabila terdapat tiga unsur, kalau salah satunya terdapat dalam satu unsur, maka negara tersebut dapat dikatakan negara agama, atau negara teokarasi. Ketiga unsur tersebut adalah :

1. Negara mempunyai agama resmi atau agama negara.
2. Sumber hukum negara adalah kitab suci dari agama resmi/negara.
3. Pimpinan negara berada di tangan tokoh-tokoh agama karena ketokohan agamanya.¹³

Menurut Munawir Sjadzali Pancasila tidak terdapat unsur tersebut. Pancasila tidak mempunyai agama resmi negara, meskipun 90 persen dari bangsa Indonesia beragama Islam, dan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi sumber hukum disalurkan melalui lembaga legislatif. Pimpinannya pun seorang warga negara biasa yang dipilih dan diangkat oleh MPR, bukan

¹¹ Bahtiar Effendi, “ Islam dan Negara di Indonesia: Munawwir Sjadzali dan Pengembangan Dasar-dasar Teologi Politik Islam”, dalam Muahammad Wahyuni Nafis (ed), *Kontektualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawwir Sjadzali, MA*, cet. 1. (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 403.

¹² *Ibid, Islam...*, hlm. 210.

¹³ *Ibid*, “Negara Pancasila...”, hlm. 80.

ulama dan pendeta.¹⁴ Maka negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara Agama.

Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila bukan berarti tidak berhubungan dengan agama. Hal ini Terbukti dengan berdirinya Kementerian Agama yang mempunyai misi meningkatkan kehidupan beragama dan mengembangkan kerukunan hidup antara umat-umat dari berbagai agama. Berarti Pemerintah Republik Indonesia mencampuri langsung dan sadar kehidupan keagamaan rakyatnya. Dan Munawir menolak pandangan yang menginginkan pemisahan antara Islam dan masalah-masalah Negara.

Menyimak dan menyikapi pemikiran Munawir Sjadzali diatas, sebagaimana pendukung gerakan intelektual baru Islam lainnya-Munawir mengajukan jalan tengah dalam teorisasi politik Islam, dan mengacu pada pendapat KH Achmad Shiddiq, menjadikan pancasila sebagai bentuk final dari aspirasi politik Islam di Indonesia.¹⁵

Munawir sebagai Menteri Agama dalam setting dan situasi kurun waktu 10 tahun itu-lah (1983-1993), pada masa Orde Baru lebih tercemin sebagai suatu realitas baru dan kenyataannya yang terjadi di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan-keberhasilan disegala bidang keagamaan yang dihasilkannya sewaktu di negara ini tidak terdapat partai Islam. Dengan melihat sejarah Indonesia sejak awal kemerdekaan, Munawir menyatakan

¹⁴ *Ibid*, hlm 81.

¹⁵ Munawir sjadzali, “ Asas Pancasila, Aspirasi Umat Islam dan Masa Depan Bangsa”, dalam *Islam Realitas*, hlm. 42.

bahwa, hanya dengan jalan konstitusional-lah kepentingan umat Islam berhasil ditempuh.¹⁶

Oleh karena itu Munawir nampaknya masih meneruskan misi yang tadinya diemban Menteri Agama sebelumnya Alamsyah Ratu Prawiranagara, dengan melakukan rekonsiliasi dan memantapkan legitimasi umat Islam terhadap Pancasila.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, agar diperoleh pembahasan yang konsisten mengenai obyek material yang dikaji. Maka masalah yang menjadi perhatian dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bagaimana pemikiran Munawir Sjadzali tentang hubungan: agama (Islam) dan Pancasila?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengkaji, kemudian menganalisa pemikiran Munawir Sjadzali tentang Islam dan negara.

¹⁶ Munawir Sjadzali, “Aspirasi Umat Islam Terpenuhi Tanpa Partai Islam”, dalam *Islam Realitas*, hlm. 61.

¹⁷ Dawam Raharjo, “Kecendikiawanan dan Masalah Legitimasi Politik di Indonesia”, dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam...*, halm. 395.

- b. Melakukan deskripsi pemikiran Munawir Sjadzali dengan melakukan sintesa dan interpretasi terhadap negara serta pandangannya tentang negara: agama (Islam) dan Pancasila.

2. Kegunaan Penelitian.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut tentang keberadaan politik Islam ditengah-tengah era perkembang zaman.
- b. Memberikan sumbangan dalam khasanah keilmuan bagi persoalan yang berkaitan.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk memahami pemikiran Munawir Sjadzali, maka penulis akan mengkaji secara langsung terhadap karya-karya Munawir Sjadzali, terutama yang berhubungan dengan Islam dan negara di Indonesia, sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja adalah dengan melihat realita yang terjadi pada perkembangan politik Islam dan negara pada awal-awal kemerdekaan sampai tahun 70-an dan masa Orde Baru ketika Munawir Sjadzali menjabat sebagai Menteri Agama dalam kurun waktu (1983-1993). Sebab setting dan situasi demikian-lah yang mempengaruhi corak pemikiran Munawir Sjadzali dalam mewarnai khasanah pemikiran politik Islam di Indonesia.

Sebuah sketsa yang mengupas tentang biografi dan latar belakang perjalanan hidup beliau sejak kecil, serta sumbangan terhadap bangsa Indonesia pada masa jabatannya sebagai Menteri Agama sudah barang tentu tidak dipisahkan begitu saja dalam pembahasan skripsi ini, didalamnya juga

terdapat sejumlah tokoh-tokoh intelektual yang menyumbangkan tulisannya, mengenai pokok-pokok pemikirannya. Termasuk didalamnya membahas hubungan Islam dan negara yang dikembangkan Munawir yang pada gilirannya berperan dalam membentuk gagasannya mengenai sifat negara-bangsa Indonesia juga Pancasila sebagai ideologi melalui tulisan Bahtiar Effendy.¹⁸

Sejarah pendirian suatu negara, hampir setiap awal merumuskan berdirinya selalu diawali dengan pencarian kesepakatan antar komunitas yang akan mendukung keberadaan suatu negara. Sebagai contoh Nabi Muhammad SAW meninggalkan catatan sejarah terkenal dengan sebutan Piagam Madinah.¹⁹ Hal serupa terjadi dalam hal pencarian konsep dasar negara. Khususnya konsep negara Islam, tidak terkecuali perdebatan yang berkepanjangan dalam kasus sejarah kenegaraan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan dan selanjutnya, sebagaimana yang dikemukakan Ma'arif. Syafi'i Ma'arif memaparkan bagaimana umat Islam pada saat itu berjuang mempertahankan idealismenya agar Islam dijadikan landasan legal-formal bernegara.²⁰

Selanjutnya, dalam merumuskan kembali sistem sosial politik Islam khususnya di abad modern, konsep sistem kekuasaan mulai dipertanyakan

¹⁸ Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualitas Ajaran Islam..* (Jakarta: Paramadina, 1995). hlm. 75.

¹⁹ W. Montgomery Watt, *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: P3M, 1988). hlm. 95.

²⁰ Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah...*, hlm. 143.

kembali, beberapa penulis sudah berani mempermasalahkan kondisi suatu negara, tatkala negara tersebut tak dapat menjamin hajat warga negaranya, persoalan tersebut dapat dilihat dalam bukunya Abdul Wahab al-Affandi, *Who needs an Islamic State?*, yang diterjemahkan oleh Amiruddin dengan judul, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*.²¹

Kemudian untuk mendapat uraian historis mengenai perkembangan politik yang menandai respon umat Islam terhadap Pancasila, dengan melihat bagaimana sejarah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan bagaimana bentuk respon umat Islam terhadap Pancasila berikut alasan-alasan yang mendasarinya baik secara individu maupun kelompok, dapat dilihat dalam bukunya Faisal Ismail yang berjudul, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, wacana ketegangan kreatif Islam dan Pancasila*.²²

Dengan menggunakan buku-buku tersebut maka dalam penulisan penelitian ini diharapkan akan didapatkan data-data yang valid yang digunakan dalam pembahasan masalah yang di kaji.

E. Metode Penelitian

Setiap yang bernuansa ilmiah, maka diperlukan suatu metode sebagai cara kerja dalam menjelaskan suatu obyek yang menjadi bahan kajian. Agar memudahkan penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

²¹ Abdul Wahab Al-Affandi, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik teori Politik Islam*, alih bahasa oleh Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKIS, 1994). hlm. 53.

²² Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999). hlm. 67.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji dan menelaah data yang berkaitan dengan pokok bahasan berupa buku-buku yang representatif dengan topik bahasan, maka metode yang dipergunakan adalah dokumentasi, datanya disebut data literatur.

Teknik pengumpulan data dibagi dua sumber yaitu:

a. Data primer

Data primer berupa buku Munawir Sjadzali yang berkaitan langsung tentang Islam dan Negara. Adapun tulisannya : “*Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*” dan “*Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*”.

b. Data sekunder

Data sekunder berupa buku-buku yang ada kaitannya tentang Islam dan negara. Buku tersebut sebagai penunjang pemikiran Munawir Sjadzali tentang Islam dan Negara (Negara Pancasila Bukan Negara Agama).

2. Metode pengolahan data

Dari data-data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Deskriptif

Dengan menelaah dan menjelaskan masalah-masalah yang ada dalam pokok bahasan, kemudian menganalisa permasalahan sehingga

masalah menjadi jelas dan diketahui letak persamaan dan perbedaan bila dimungkinkan.

b. Analisa

Analisa yang dimaksud adalah perincian istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan kedalam bagian-bagiannya. Sehingga dapat melakukan pemeriksaan atas makna yang dikandungnya.²³ Dengan metode ini penulis berusaha menelaah secara kritis data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder.

Pendekatan dalam penulisan skripsi ini, menggunakan historis analitis. Maksud dari pendekatan ini untuk menganalisa sejarah tokoh-tokoh yang menjadi obyek kajian dengan melihat latar belakang pemikiran tentang Islam dan Negara. Sehingga dapat ditemukan alasan untuk mengemukakan pemikiran mereka.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan proses penyusunan yang konsisten dan terarah diperlukan uraian yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²³ Louis O. Kattsof, *Pengantar Filsafat terj.* Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 18.

Bab II mengulas secara sistematis tentang biografi Munawir Sjadzali, yang meliputi riwayat baik di masa kecil hingga menjadi pelajar, perjuangan dan karir, juga sumbangan pemikiran Munawir Sjadzali yang diberikan pada bangsa Indonesia ketika ia menjabat sebagai Menteri Agama. Dalam bab ini juga membahas basis pemikiran Munawir, baik keIslaman dan politiknya.

Bab III berisi landasan teori tentang negara dalam Islam secara umum. Kemudian memaparkan tentang sejarah dan pemerintahan dalam Islam, dan selanjutnya terbentuk tipologi-tipologi pemikiran bernegara sebagai acuan umum dalam membaca pemikiran Munawir tersebut.

Bab IV menjelaskan mengenai pemikiran Munawir tentang negara Pancasila bukan negara agama. Dengan terlebih dahulu mengupas tentang negara agama, kemudian negara Pancasila.

Bab V merupakan penutup meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Dalam uraian kesimpulan tersebut berisi tentang pokok pikiran sebagai refleksi. Sedangkan saran-saran memuat pesan-pesan penulis kepada siapa saja yang bermaksud memahami atau meneliti pemikiran Munawir Sjadzali lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti berikut:

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bukanlah negara agama, karena menurut Munawir Negara agama memenuhi tiga unsur:

- a. Negara mempunyai agama resmi atau agama negara.
- b. Sumber hukum negara adalah kitab suci dari agama resmi/negara.
- c. Pimpinan negara berada ditangan tokoh-tokoh agama.

Karena Negara Indonesia tidak memenuhi unsure tersebut, maka Negara Indonesia bukanlah Negara agama.

Faktor yang menyebabkan munculnya Negara Pancasila bukan Negara agama oleh Munawir sebagai berikut; Adanya usaha memperjuangkan kepentingan umat Islam oleh tokoh-tokoh Islam generasi lebih awal kebetuk yang lebih formalistik, legalistik, sebagaimana diartikulasikan Abul al-maududi, yang disebabkan oleh kecurigaan penafsiran Pancasila oleh satu golongan. Sehingga sering oleh Negara, itu diartikan sebagai usaha ingin mendirikan Negara agama, dan kenyataan itu pada akhirnya membawa dampak kekalahan-kekalahan bagi umat Islam itu sendiri, bukan saja hanya pada aspek politik, melainkan berpengaruh pada aspek sosial-ekonomi.

Adapun pemikiran Munawir tersebut untuk kemaslahatan ganda. Disatu pihak kemaslahatan itu untuk umat Islam itu sendiri dan dipihak lain untuk kemaslahatan rakyat secara umum yang diletakan dalam bingkai pluralisme. Untuk itu Munawir mendukung konsep Negara-bangsa Indonesia, karena melihat bentuk dan struktur Negara nasional sekarang ini berkembang merupakan model yang paling memungkinkan dalam konteks alam Indonesia. Dengan demikian Munawir mengambil jalan tengah bagi teorisasi politik islam, dengan menjadikan kontruk ideologi Negara yang sekarang ini (Pancasila) dipandang sebagai tujuan final aspirasi politik umat Islam di Indonesia.

B. Saran-saran

Setiap penulisan tentu mempunyai perbedaan persepsi dari pemahaman setiap konteks permasalahan. Perbedaan pemahaman dalam menganalisa setiap permasalahan merupakan sifat dari setiap manusia. Maka dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyarankan perlu kajian yang lebih jauh, mengingat pemikiran Islam dan Negara di Indonesia masih terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-affandi, Abdul Wahab. *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, alih bahasa oleh Amirudan Arrani. Yogyakarta: Lkis, 1998.
- Al-Maududi, Abdul A'la. *Khalifah dan Kerajaan*. ter. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Mizan, 1993.
- Abdul Hakim Sudarmoto, Hasan Asari, Yudian, W. Asmin. *Islam berbagai Perspektif*. Yogyakarta: LPMI, 1995.
- Ali, Abd ar-Raziq. *Islam dan Dasar-dasar Pemerintah*. Alih bahasa. M. Zaid Su'di. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Ali, Mukti. *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Bakrie, Oemar. *Islam Menentang Sekularisme*. Jakarta: Mutiara.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992.
- Effendi, Bahtiar. *Islam dan Negara, Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Ghofur, Abdul. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ismail, Faisal. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Kattsof, Louis O. *Pengantar Filsafat*. Terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

Komaruddin Hidayat, Ahmad Gaus AF. (ed). *Islam, Negara dan Civil Society*. Jakarta: Paramadina.

Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.

Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan Study Tentang Pencaturan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1996.

Muchtar Ghazali, Adeng. *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam*. Bandung: Benang Merah Press, 2004.

Mulkhan, Abdul Munir. *Perubahan Prilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987 dalam Perspektif Sosiologis*. Jakarta: Rajawali, 1989.

Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1996.

Panitia Penulisan Buku, Muhammad Wahyuni Nafis, Budi Munawar Rahman (ed.). *Kontektualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof Munawir Sjadzali, MA*. Jakarta: Paramadina, 1995.

Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah, ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Raya Grafindo Persada, 1994.

-----*. Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raya Grafindo Persada, 1994.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Negara, Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multi Partai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan, Partisipasi dalam*

- pemerintahan Sekuler*. Alih bahasa Syafril Halim. Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*. Jakarta: UI Press, 1993.
- . *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Tobroni dan Syamsul Arifin. *Islam Pluralisme dan Budaya Politik*. Yogyakarta: SIpess, 1994.
- Watt, W. Montgomery. *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: P3M, 1988.
- Zahrah, Abu (ed.). *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Zaidan, Abdul Karim. *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*. Alih bahasa. Abdul Aziz. Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984.

CURICULUM VITAE

Nama : Dedy Faisal
Tempat tanggal lahir : Jambi 29 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : JL. Iskandar Muda 87 Sei Asam Kec Pasar Jambi
Kodya Jambi. Jambi. 36134
Alamat Yogyakarta : JL. Nologaten Gang temu ireng RT 1/1 No 7a
CT.Depok Sleman Yogyakarta

Pendidikan :

- SD Negeri 06 Jambi lulus pada tahun 1992
- Mts Al-Chairiyah Jambi lulus pada tahun 1996
- MAS Pon-Pes Al-Syaikh Abdul Wahid lulus pada tahun 1999
- Masuk UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta pada tahun 2000